



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Slamet Riyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213
Telepon (0335) 422121, Faksimile (0335) 425301

Laman disperinnaker.probolinggokota.go.id, Pos-el disperinnaker@probolinggokota.go.id

BERITA ACARA EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada hari ini Tanggal Bulan April Tahun 2025 telah diselenggarakan EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi kinerja ini dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Realisasi

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN / TRIWULAN I	Target Kinerja / TAHUN	CAPAIN KINERJA / TRL I	KET
1.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Rp. 6,250,000.00	Rp. 0	12 laporan	3	
2.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Movev dan Penilaian Kinerja yang dilaksanakan	Rp. 4,050,000.00	Rp. 0	12 dokumen	3	
3.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp.28,476,500.00	10,292,500	12 laporan	3	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 6,272,500.00	0	12 laporan	0	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp. 3,120,000.00	Rp.520,000	12 laporan	10	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 7,000,000.00	0	12 laporan	0	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 164,726,895.00	Rp.25,920,300	12 laporan	10	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 4,150,000.00	0	12 laporan	0	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.25,230,000.00	Rp.5,647,080	12 laporan	3	
4.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp.74,500,000.00	0	3 laporan	1	
5.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp.126,990,000.00	Rp.17,349,781	12	3	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp.280,233,760.00	Rp.57,677,860.00	12	3	
6.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya serta BBM	Rp.88,437,600.00	Rp.19,822,744	12	3	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Rp.24,000,000.00	Rp.8,320,000	12	3	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor yang dipelihara	Rp.127,610,000.00	0	2	0	
7.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Rp.2,266,631,500.00	Rp.383,094,900	100 perusahaan	25	
8.	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka	Rp.112,415,100.00	Rp.5,604,846	2	2	

	PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan hubungan industrial					
9.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Rp.32,144,000.00	Rp.7,455,846	10 dokumen	3	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Rp.24,645,000.00	Rp.2,835,000	10 dokumen	3	
10	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Rp.7,796,505,887.00	Rp.1,856,562,334	61	61	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Rp.116,642,000.00	Rp.2,025,000	12	3	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Rp.8,895,000.00	0	12	3	
11.	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja	Rp.38,332,630.00	0	50	0	

		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Rp.97,152,000.00	Rp.5,604,846	20	0	
12.	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair	Rp.40,000,000.00	0	130	0	
13.	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat	0	0	0	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat ketrampilannya	Rp.40,112,850.00	Rp.5,460,846	4	3	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri	Rp.176,499,309.00	Rp.18,278,346	8	4	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan pembinaan pengembangan usaha	Rp.16,871,778.00	0	2	0	
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	Rp.1,650,000.00	0	1	0	
14.	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan	Persentase pemeriksaan lapangan atas ijin usaha	Rp.15,828,097.00	Rp.7,800,000	10	5	

	PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	industri (IUI) yang diajukan					
15	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase pelaku industri yang memenuhi kewajiban pelaporan industri	Rp.22,269,830.00	0	4	0	
16	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan yang dilaksanakan	Rp.3,400,296,200.00	Rp.425,588,692.00	48	5	
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Rp.171,558,000.00	Rp.34,828,570.00	12	3	

2. Permasalahan/Kendala

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang di evaluasi :

1. ANDAYANI RESMI HARYATI, S.I.P.

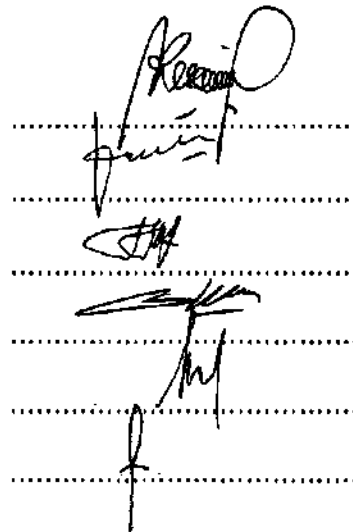
2. DEWI ARLIANA PUSPITASARI, S.H., M.M.

3. DYAH SUSILANINGTYAS, S.Sos., M.Si

4. TRI AGUS WIBOWO, S.Pd, M.Pd

5. NGATMITO, S.Sos.

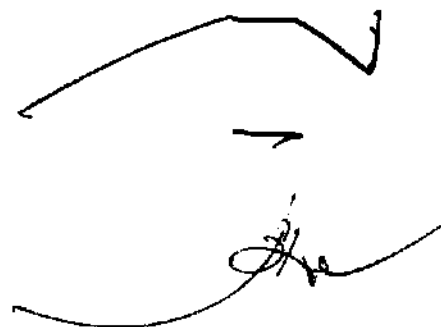
6. PIPIN WAHYUDI, S.IP., M.AP.



Tim Penilai :

1. BUDIONO WIRAWAN, S.SOS., M.S

2. RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos, M.Si





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Slamet Riyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213

Telepon (0335) 422121, Faksimile (0335) 425301

Laman disperinnaker.probolinggokota.go.id, Pos-el disperinnaker@probolinggokota.go.id

BERITA ACARA EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada hari ini Tanggal Bulan JULI Tahun 2025 telah diselenggarakan EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi kinerja ini dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Realisasi

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN / TRIWULAN II	Target Kinerja / TAHUN	CAPAIN KINERJA / TRI. II	KET
1.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Rp. 6,250,000.00	Rp. 0	12 laporan	3	
2.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monev dan Penilaian Kinerja yang dilaksanakan	Rp. 4,050,000.00	Rp. 0	12 dokumen	3	
3.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp.28,476,500.00	Rp 4,377,285.00	12 laporan	3	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 6,272,500.00	Rp 550,000.00	12 laporan	0	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp. 3,120,000.00	Rp 520,000.00	12 laporan	10	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 7,000,000.00	Rp 1,951,500.00	12 laporan	0	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 164,726,895.00	Rp 10,801,000.00	12 laporan	10	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 4,150,000.00	0	12 laporan	0	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.25,230,000.00	Rp 5,644,080.00	12 laporan	3	
4.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp.74,500,000.00	0	3 laporan	0	
5.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp.126,990,000.00	Rp 36,059,654.00	12	3	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp.280,233,760.00	Rp 63,246,280.00	12	3	
6.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya serta bbm	Rp.88,437,600.00	Rp 5,761,813.00	12	3	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Rp.24,000,000.00	0	12	3	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor yang dipelihara	Rp.127,610,000.00	Rp 2,697,300.00	2	0	
7.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Rp.2,266,631,500.00	Rp 553,929,600.00	100 perusahaan	25	
8.	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka	Rp.112,415,100.00	Rp 51,278,898.00	2	2	

	PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan hubungan industrial					
9.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Rp.32,144,000.00	Rp 6,944,898.00	10 dokumen	3	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Rp.24,645,000.00	0	10 dokumen	3	
10	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Rp.7,796,505,887.00	Rp 1,830,272,587.00	61	61	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Rp.116,642,000.00	Rp 24,567,000.00	12	3	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Rp.8,895,000.00	Rp 3,435,000.00	12	3	
11.	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja	Rp.38,332,630.00	0	50	0	

		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Rp.97,152,000.00	Rp 5,603,898.00	20	0	
12.	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair	Rp.40,000,000.00	0	130	0	
13.	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat	0	0	0	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat ketrampilannya	Rp.40,112,850.00	Rp 18,478,898	4	1	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri	Rp.176,499,309.00	Rp 10,297,898	8	1	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan pembinaan pengembangan usaha	Rp.16,871,778.00	0	2	0	
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	Rp.1,650,000.00	0	1	0	
14.	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan	Persentase pemeriksaan lapangan atas ijin usaha	Rp.15,828,097.00	Rp 1,350,000	10	3	

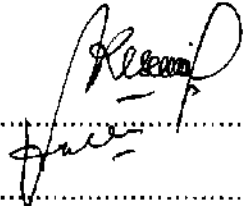
	PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	industri (IUI) yang diajukan					
15	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase pelaku industri yang memenuhi kewajiban pelaporan industri	Rp.22,269,830.00	Rp 9,517,620	4	4	
16	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan yang dilaksanakan	Rp.3,400,296,200.00	Rp 1,041,412,878.00	48	11	
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Rp.171,558,000.00	Rp 36,970,108.00	12	3	

2. Permasalahan/Kendala

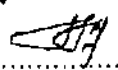
Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang di evaluasi :

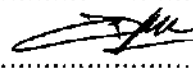
1. ANDAYANI RESMI HARYATI, S.I.P.



2. DEWI ARLIANA PUSPITASARI, S.H., M.M.



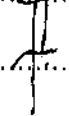
3. DYAH SUSILANINGTYAS, S.Sos., M.Si



4. TRI AGUS WIBOWO, S.Pd, M.Pd



5. WAWAN YULIANTO C.S



6. PIPIN WAHYUDI, S.IP., M.AP.

Tim Penilai :

1. BUDIONO WIRAWAN, S.SOS., M.S



2. RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos, M.Si





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Slamet Riyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213

Telepon (0335) 422121, Faksimile (0335) 425301

Laman disperinaker.probolinggokota.go.id, Pos-el disperinnaker@probolinggokota.go.id

BERITA ACARA EVALUASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Pada hari ini Tiga Puluh Tanggal Bulan September Tahun 2025 telah diselenggarakan EVALUASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Evaluasi kinerja ini dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Realisasi

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN / TRIWULAN III	Target Kinerja / TAHUN	CAPAIN KINERJA / TRI. III	KET
1.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Rp. 6,250,000.00	Rp. 0	12 laporan	3	
2.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monev dan Penilaian Kinerja yang dilaksanakan	Rp. 4,050,000.00	Rp. 0	12 dokumen	3	
3.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp. 28,476,500.00	Rp. 0	12 laporan	3	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 6,272,500.00	Rp. 4.725.088,00	12 laporan	3	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp. 3,120,000.00	Rp. 1.040.000,00	12 laporan	3	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 7,000,000.00	Rp. 3,915,880.00	12 laporan	3	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 164,726,895.00	Rp. 10,801,000.00	12 laporan	3	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 4,150,000.00	Rp. 3,599,996.00	12 laporan	3	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.. 25,230,000.00	Rp. 5,641,080.00	12 laporan	3	
4.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp. 74,500,000.00	Rp. 86,946,300.00	3 laporan	1	
5.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp. 126,990,000.00	Rp. 21,893,719.00	12	3	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp. 280,233,760.00	Rp. 69,075,186.00	12	3	
6.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya serta bbm	Rp. 88,437,600.00	Rp. 1 8,127,460.00	12	3	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Rp. 24,000,000.00	Rp. 6,000,000.00	12	3	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor yang dipelihara	Rp. 127,610,000.00	Rp. 188,158,000.00	1	0	
7.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Rp. 2,266,631,500	Rp. 737,202,400.00	100 perusahaan	100	
8.	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka	Rp. 112,415,100.00	Rp. 23,963,898.00	12	4	

	PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan hubungan industrial					
9.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Rp. 32,144,000.00	Rp. 11,267,898.00	10 dokumen	3	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Rp. 24,645,000.00	Rp. 2,426,400.00	10 dokumen	3	
10	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Rp.7,796,505,887.00	Rp 1,505,373,734.00	61	48	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Rp. 116,642,000.00	Rp. 22,427,000.00	12	3	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Rp .8,895,000.00	Rp. 3,435,000.00	12	0	
11.	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja	Rp. 38,332,630.00	Rp. 7,350,000.00	50	0	

		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 97,152,000.00	Rp. 5,603,898.00	20	0	
12.	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair	Rp. 40,000,000.00	Rp. 30,182,100.00	130	137	
13.	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat	0	0	0	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat ketrampilannya	Rp. 40,112,850.00	Rp. 5,459,898.00	4	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri	Rp. 176,499,309.00	Rp. 70,835,398.00	8	2	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan pembinaan pengembangan usaha	Rp. 16,871,778.00	Rp. 1,000,000.00	2	1	
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	Rp. 1,650,000.00	0	1	0	
14.	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan	Persentase pemeriksaan lapangan atas ijin usaha	Rp. 15,828,097.00	Rp. 1,350,000	10	1	

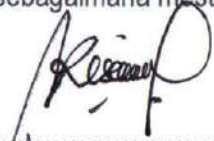
	PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	industri (IUI) yang diajukan					
15	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase pelaku industri yang memenuhi kewajiban pelaporan industri	Rp. 22,269,830.00	Rp. 0	4	0	
16	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan yang dilaksanakan	Rp.3,400,296,200.00	Rp 1,055,384,451.00	48	12	
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Rp. 171,558,000.00	Rp. 40,391,519.00	12	3	

2. Permasalahan/Kendala

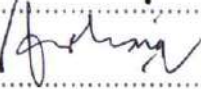
Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang di evaluasi :

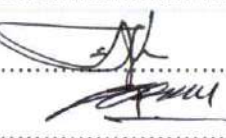
1. ANDAYANI RESMI HARYATI, S.I.P.


.....

2. DEWI ARLIANA PUSPITASARI, S.H., M.M.


.....

3. DYAH SUSILANINGTYAS, S.Sos., M.Si


.....

4. TRI AGUS WIBOWO, S.Pd, M.Pd


.....

5. WAWAN YULIANTO C.S


.....

6. PIPIN WAHYUDI, S.IP., M.AP.

Tim Penilai :

1. Ir. RETNO FADJAR WINARTI


.....

2. AGUS RIAN TO S.STP, M.Si


.....



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Slamet Riyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213

Telepon (0335) 422121, Faksimile (0335) 425301

Laman disperinaker.probolinggokota.go.id, Pos-el disperinnaker@probolinggokota.go.id

BERITA ACARA EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

Pada hari ini Tiga Puluh Tanggal Bulan Desember Tahun 2025 telah diselenggarakan EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

Evaluasi kinerja ini dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Realisasi

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN / TRIWULAN IV	Target Kinerja / TAHUN	CAPAIN KINERJA / TRI. IV	KET
1.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Rp. 6,250,000.00	Rp. 1,875,000.00	12 laporan	3	
2.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monev dan Penilaian Kinerja yang dilaksanakan	Rp. 4,050,000.00	Rp. 0	12 dokumen	3	
3.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp. 28,476,500.00	Rp. 22,868,353.00	12 laporan	3	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 6,272,500.00	Rp. 300.000,00	12 laporan	3	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp. 3,120,000.00	Rp. 1.040.000,00	12 laporan	3	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 7,000,000.00	Rp 400,000.00	12 laporan	3	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 164,726,895.00	Rp 22,375,300.00	12 laporan	3	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 4,150,000.00	Rp. 3,599,996.00	12 laporan	3	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.. 25,230,000.00	Rp. 5,644,080.00	12 laporan	3	
4.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp. 176,750,000.00	Rp. 78,740.061.00	3 laporan	1	
5.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp. 126,990,000.00	Rp. 35,844,533.00	12	3	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp.296.690,533.00	Rp. 104,483,082.00	12	3	
6.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya serta bbm	Rp. 88,437,600.00	Rp. 16,716,885.00	12	3	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Rp. 24,000,000.00	Rp. 7,520,000.00	12	3	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor yang dipelihara	Rp. 127,610,000.00	Rp. 39,691,955.00	1	0	
7.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Rp 2,266,631,500	Rp. 612,606,980.00	100 perusahaan	100	
8.	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka	Rp. 112,415,100.00	Rp. 13,651,398.00	12	4	

	PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan hubungan industrial					
9.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Rp. 32,144,000.00	Rp. 7,279,864.00	10 dokumen	3	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Rp. 24,645,000.00	Rp. 4,346,100.00	10 dokumen	3	
10	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Rp.7,796,505,887.00	Rp 1,836,409,315.00	61	48	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Rp. 116,642,000.00	Rp. 45,954,000.00	12	3	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Rp .8,895,000.00	Rp. 2,508,000.00	12	3	
11.	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja	Rp. 38,332,630.00	Rp. 21,929,050.00	50	0	

		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 97,152,000.00	Rp. 89,115,302.00	20	18	
12.	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair	Rp. 40,000,000.00	Rp. 0	130	137	
13.	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat	0	0	0	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat ketrampilannya	Rp. 40,112,850.00	Rp. 7,279,864.00	4	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri	Rp. 306,496,070.00	Rp. 200,458,511.00	8	1	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan pembinaan pengembangan usaha	Rp. 16,871,778.00	Rp. 16,450,000.00	2	1	
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	Rp. 1,650,000.00	Rp. 1,620,000.00	1	1	
14.	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan	Persentase pemeriksaan lapangan atas ijin usaha	Rp. 15,828,097.00	Rp. 2,632,500	10	1	

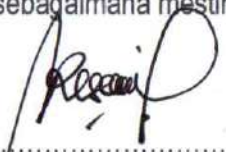
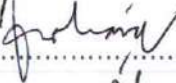
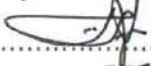
	PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	industri (IUI) yang diajukan					
15	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase pelaku industri yang memenuhi kewajiban pelaporan industri	Rp. 22,269,830.00	Rp. 0	4	0	
16	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan yang dilaksanakan	Rp. 4,208,863,001	Rp 1,190,645,803.00	48	628	
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Rp. 174,409,672.00	Rp. 45,414,452.00	12	3	

2. Permasalahan/Kendala

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang di evaluasi :

1. ANDAYANI RESMI HARYATI, S.I.P.
2. DEWI ARLIANA PUSPITASARI, S.H., M.M.
3. DYAH SUSILANINGTYAS, S.Sos., M.Si
4. TRI AGUS WIBOWO, S.Pd, M.Pd
5. WAWAN YULIANTO C.S
6. PIPIN WAHYUDI, S.IP., M.AP.


.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tim Penilai :

1. Ir. RETNO FADJAR WINARTI
2. AGUS Rianto S.STP , M.Si


.....

.....